

Analysis of Behavioral Aspects in the Village Fund Budgeting Process in North Pinabetengan Village, West Tompaso District

Viany Tandaju^{1*}, Victorina Z. Tirayoh², Djeini Maradesa³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Viany Tandaju vianymltandaju@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Behavioral Accounting, Budgeting, Village Fund

Received : 22, July

Revised : 24, August

Accepted: 26, September

©2025 Tandaju, Tirayoh, Maradesa:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The management of village funds is not only determined by technical aspects, but also greatly influenced by the behavior of village officials and community participation. This study aims to analyze behavioral aspects in the village fund budgeting process in North Pinabetengan Village, West Tompaso District. The focus of the research includes three important stages, namely goal setting, implementation, and control and evaluation. This research uses a qualitative approach with interview and documentation techniques. The results of the study show that active community participation through village deliberations and the commitment of village officials play a major role in the success of budget management. However, the lack of communication and public understanding of budget procedures is still the main obstacle. Understanding behavioral aspects at each stage of budgeting is expected to increase transparency, accountability, and effectiveness of village fund management.

Analisis Aspek Keperilakuan dalam Proses Penganggaran Dana Desa di Desa Pinabetengan Utara, Kec. Tomposo Barat

Viany Tandaju^{1*}, Victorina Z. Tirayoh², Djeini Maradesa³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Viany Tandaju vianymltandaju@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akuntansi Keperilakuan, Penganggaran, Dana Desa

Received : 22, Juli

Revised : 24, Agustus

Accepted: 26, September

©2025 Tandaju, Tirayoh, Maradesa:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku aparat desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek berperilaku dalam proses penganggaran dana desa di Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tomposo Barat. Fokus penelitian meliputi tiga tahapan penting, yaitu penetapan tujuan, implementasi, serta pengendalian dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa serta komitmen perangkat desa berperan besar dalam keberhasilan pengelolaan anggaran. Namun, kurangnya komunikasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur anggaran masih menjadi kendala utama. Pemahaman terhadap aspek berperilaku di setiap tahap penganggaran diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada tingkat desa. Akuntansi keperilakuan menjadi semakin relevan karena menekankan keterkaitan antara perilaku individu maupun kelompok dengan sistem informasi dalam proses penganggaran. Faktor perilaku seperti komunikasi, motivasi, partisipasi, dan komitmen sangat memengaruhi efektivitas penganggaran, khususnya dalam pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa diatur dalam UU No. 62 Tahun 2024 dan PMK No. 108 Tahun 2024 yang menekankan pengalokasian dana secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat tantangan, terutama lemahnya pemahaman aparat desa serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban, pelaporan, dan komunikasi anggaran.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tomposo Barat, yang telah menerima dana desa sejak 2011. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana serta lemahnya komunikasi dalam penyusunan anggaran. Akibatnya, partisipasi masyarakat tidak optimal dan transparansi anggaran menjadi terhambat. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keperilakuan dalam tahapan penganggaran dana desa. Hasilnya diharapkan dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang berkaitan dengan entitas untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Kieso et al., 2019). Akuntansi merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengesahkan, mengukur, mengklasifikasi, menggabungkan, meringkas, dan menyajikan data keuangan dasar yang terjadi pada suatu unit organisasi dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah proses yang digunakan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada manajer untuk membantu mereka dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen berfokus pada analisis biaya, penganggaran, dan evaluasi kinerja, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Azhari, 2024).

Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang, (Lestari, 2021). Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab.

Penganggaran

Penganggaran adalah proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Proses ini melibatkan estimasi biaya yang diperlukan untuk berbagai aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang tepat (Triyonowati, 2023). Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab.

Akuntansi Keperilakuan

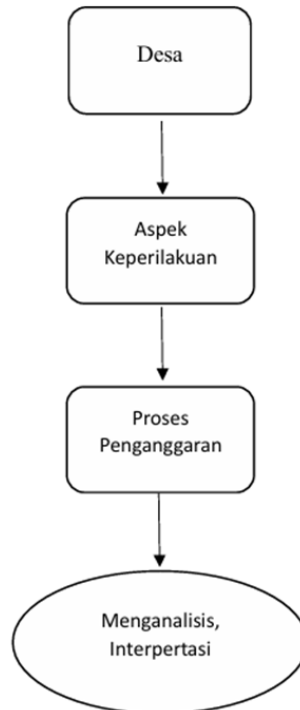
Menurut Nasution (2024), akuntansi keperilakuan adalah cabang dari akuntansi yang mempelajari aspek-aspek perilaku manusia dalam konteks pelaporan keuangan, pengambilan keputusan, dan sistem informasi akuntansi. Fokus utama dari akuntansi keperilakuan adalah memahami bagaimana faktor faktor psikolog, sosial, dan emosional mempengaruhi tindakan dan keputusan yang dibuat individu atau kelompok dalam lingkungan akuntansi.

Aspek Keperilakuan Akuntansi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran

Aspek keperilakuan akuntansi dalam proses perencanaan dan penganggaran merujuk pada bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi penyusunan anggaran. Ini mencakup pemahaman tentang motivasi, pengaruh sosial, dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi hasil perencanaan dan penganggaran (Sari, 2023). Aspek keperilakuan dalam proses perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan bagaimana faktor psikologis, sosial, dan organisasi mempengaruhi cara individu maupun kelompok dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi anggaran.

Dana Desa

Dana desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (UU No. 6 tahun 2014). Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Permendesa PDTT No. 2 tahun 2024).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif pendekatan deskriptif Menurut Sugiyono (2020:18) metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek berperilaku dalam proses penganggaran di desa Pinabetengan Utara Kec. Tompaso Barat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Pinabetengan Utara Kec. Tompaso Barat, Kab. Minahasa. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari Mei hingga Juni 2025.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan **data kualitatif**, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar (Sugiyono, 2020). Data kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena perilaku dan dinamika dalam proses penganggaran desa secara mendalam. Data ini diperoleh melalui pengumpulan informasi langsung di lapangan, khususnya terkait faktor-faktor berperilaku yang memengaruhi setiap tahapan penganggaran.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan (Surjarweni, 2023).

Menurut Sugiyono (2020) metode pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara, yaitu teknik tanya jawab langsung dengan narasumber untuk menggali informasi mendalam mengenai aspek berperilaku dalam proses penganggaran.
2. Dokumentasi, yaitu sebagai pelengkap wawancara, dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.
3. Audio visual, yakni perekaman percakapan selama wawancara menggunakan alat perekam untuk memastikan setiap jawaban terdokumentasi secara akurat.

Metode dan Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menekankan pada pengolahan data berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka (Sugiyono, 2020). Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek berperilaku dalam proses penganggaran dana desa.

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Tahapan yang ditempuh meliputi: pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan rekaman audio-visual dengan aparat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD); reduksi data dengan memilah, mengelompokkan, dan menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, seperti partisipasi masyarakat, komunikasi, serta kendala dalam penganggaran; serta analisis data dengan menghubungkan temuan lapangan pada teori akuntansi berperilaku untuk mengidentifikasi pola perilaku, membandingkan data wawancara dengan dokumentasi, serta menilai konsistensi temuan.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis disusun secara sistematis dan dikaitkan dengan teori untuk menilai kesesuaian antara konsep dan praktik di lapangan, sekaligus memberikan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penganggaran desa.

HASIL PENELITIAN

Aspek Keperilakuan Dalam Tahapan Penganggaran

1. Tahap Penetapan Tujuan

Dalam tahap penganggaran dana desa yang dikategorikan dalam tahap penetapan tujuan dalam proses penganggaran desa yaitu MusDes, penyusunan RKPDDes, penyusunan rancangan APBDDes, pembahasan dan penetapan APBDDes.

a. Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dan lembaga desa dalam penyusunan rencana penggunaan dana desa di Desa Pinabetengan Utara tergolong baik. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa (MusDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kelompok tani, UMKM, hingga perwakilan perempuan. Semua peserta diberi kesempatan menyampaikan usulan, baik langsung maupun melalui BPD dan kepala jaga. Sebagian besar program yang direncanakan berasal dari usulan masyarakat, meski tidak seluruhnya dapat terakomodasi karena keterbatasan anggaran. Keterlibatan aktif ini mencerminkan transparansi, meningkatkan rasa memiliki, serta mendorong semangat bersama dalam penyusunan anggaran desa.

b. Keselarasan Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh perangkat desa mendukung tujuan penganggaran karena usulan yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama dalam MusDes. Hal ini menunjukkan bahwa rencana anggaran bukan keputusan sepihak aparat desa, melainkan selaras dengan aspirasi masyarakat. Rencana dana desa disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang disampaikan warga, dan dituangkan dalam PerDes APBDDes sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Keselarasan pandangan antara aparat desa dan masyarakat ini mencerminkan transparansi serta komitmen bersama, sehingga tahap penetapan anggaran di Desa Pinabetengan Utara telah berjalan optimal dan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan program selanjutnya.

c. Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara, komitmen setiap pihak terhadap tujuan penggunaan dana desa telah terbentuk kuat melalui MusDes, di mana rencana dibahas dan disepakati bersama. Perangkat desa tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen menjalankan keputusan secara konsisten. Dari sisi masyarakat, muncul komitmen sosial berupa kepercayaan kepada pemerintah desa karena program yang dilaksanakan sesuai dengan usulan mereka, meski tidak semuanya dapat terealisasi akibat keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dan partisipasi aktif, sekaligus menegaskan bahwa keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam mengakomodasi seluruh usulan, meskipun kegiatan yang terealisasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Implementasi

Dalam proses penganggaran desa yang termasuk dalam tahap implementasi yaitu penyaluran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan.

a. Komunikasi

Pernyataan hukum tua bahwa sosialisasi rencana dana desa dilakukan melalui berbagai momen kemasyarakatan seperti acara suka dan duka, serta menggunakan media pembesar suara dan media sosial, menunjukkan adanya upaya komunikasi yang intensif dan menyeluruh kepada masyarakat desa. Strategi ini penting karena mengakomodasikan berbagai segmen warga yang mungkin hadir di waktu dan tempat berbeda, sehingga informasi tentang penggunaan dana desa dapat tersebar luas dan merata

b. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, hukum tua menjelaskan bahwa setiap perangkat desa memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang saling terikat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terkoordinasi. Kerja sama antar unsur desa diwujudkan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas mengatur proses kerja, mengkoordinasi aparat dan kelembagaan desa, serta melaporkan hasilnya kepada hukum tua sebagai penanggung jawab. Dari sisi pengawasan, BPD selalu memperoleh informasi mengenai program dana desa, hadir dalam kegiatan awal, dan memberi masukan jika ada kendala. Koordinasi juga melibatkan masyarakat melalui kerja bakti dan swadaya. Dengan demikian, pelaksanaan program dana desa berjalan melalui alur yang jelas, terstruktur, partisipatif, dan mencerminkan prinsip tata kelola yang baik.

c. Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama dalam pengelolaan dana desa tercermin dari sinergitas antara perangkat desa, lembaga desa (BPD), serta partisipasi aktif masyarakat. Hukum tua menegaskan bahwa perangkat desa bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, saling mendukung, dan terintegrasi dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk secara formal. TPK menjadi wadah koordinasi yang menghubungkan perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui kerja bakti dan kontribusi langsung, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Kerja sama ini memperlihatkan penerapan tata kelola yang partisipatif dan inklusif. Namun, dalam tahap implementasi masih terdapat kendala teknis, seperti faktor alam, keterbatasan alat berat, dan kurangnya tenaga ahli yang berpengaruh pada kelancaran program.

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

Dalam proses penganggaran desa yang termasuk dalam tahap pengendalian yaitu pelaporan:

a. Tekanan

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa beban tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin desa dapat diminimalkan melalui sistem kerja yang solid dengan TPK, aparat desa, serta kelembagaan desa yang turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan. Tekanan administrasi yang biasanya muncul dalam pengelolaan keuangan desa dapat diredam oleh pembagian tugas yang jelas dan dukungan antar elemen pemerintah desa. Meskipun pengelolaan dana desa memiliki tanggung jawab besar, tekanan tidak terasa karena didukung oleh sistem administrasi keuangan yang modern dan hubungan kerja yang sinergis antar perangkat.

b. Motivasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, motivasi ini berasal dari dorongan untuk berkontribusi nyata terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tua juga menunjukkan merasa termotivasi melalui kerja sama yang solid. Termotivasi juga dengan semangat dalam menjalankan tugas karena merasa diberikan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan desa.

c. Aspirasi

Berdasarkan wawancara hukum tua menilai bahwa dana desa telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti tersedianya jalan usaha tani, saluran air, gedung pertemuan, serta program ketahanan pangan dan bantuan sosial

d. Kegelisahan

Berdasarkan wawancara pemerintah desa terbuka dalam penggunaan dana, misalnya dengan melakukan sosialisasi dan memasang baliho realisasi anggaran di kantor desa, ini dinilai mampu menenangkan kekhawatiran masyarakat dan juga BPD aktif mengawasi dan memberi saran dan kritik kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya, ini menunjukkan meskipun potensi kegelisahan bisa terjadi, namun dapat diminimalkan melalui transparansi, keterbukaan informasi. Tetapi ada kegelisahan lain yaitu kegelisahan dan kecemasan terhadap perubahan kebijakan dari tingkat atas yang dapat mempengaruhinya program desa. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi yang menjadi kendala yaitu, kekhawatiran hukum tua akan perubahan dari pemerintah pusat.

PEMBAHASAN

*Aspek Keperilakuan Dalam Tahap Penganggaran***Tabel 1. Analisis Aspek Keperilakuan dalam Tahapan Penganggaran**

No	Tahap Penganggaran	Aspek berperilaku	Temuan dilapangan	Berdasarkan Teori	Sesuai / tidak sesuai
1	Penetapan Tujuan	Partisipasi	MusDes melibatkan BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Penyampaian usulan dari semua yang terlibat dalam MusDes.	Partisipasi meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan emosional terhadap hasil anggaran.	Sesuai
		Keselarasn Tujuan	Kesepakatan dalam MusDes disepakati bersama.	Keselarasn tujuan mendorong kemudahan dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir konflik.	Sesuai
		Komitmen	Perangkat desa berkomitmen menjalankan hasil musdes, masyarakat mendukungnya.	Komitmen merupakan bentuk tanggung jawab agen terhadap principal.	Sesuai
2	Implementasi	Komunikasi	Sosialisasi atau penyampaian akan pengalokasian dana desa dilakukan melalui acara, pengeras suara, media sosial. Komunikasi antar perangkat berjalan baik.	Komunikasi efektif membangun kepercayaan dan keterlibatan. Keterbukaan adalah bentuk sinyal akuntabilitas.	Sesuai
		Koordinasi	Dibentuknya Tim pelaksana kegiatan, pembagian tupoksi yang jelas, saling koordinasi dengan masyarakat.	Koordinasi mendukung kerja tim melalui struktur organisasi yang terarah.	Sesuai
		Kerja sama	Pelaksanaan kegiatan di dukung kerja sama antar aparat dan masyarakat.	Kolaborasi memperkuat tanggung jawab kolektif dan menciptakan gerakan pembangunan.	Sesuai
3	Pengendalian & Evaluasi	Tekanan	Tekanan kerja dikendalikan dengan kerja tim dan pembagian tugas yang jelas.	Tekanan dapat dikelola jika sistem komunikasi dan pembagian tugas berjalan baik.	Sesuai
		Motivasi	Dorongan untuk berkontribusi bagi pembangunan desa menjadi sumber semangat dan motivasi.	Motivasi dapat meningkatkan akuntabilitas, bukan hanya karena insentif tapi juga karena dorongan moral.	Sesuai
		Aspirasi	Pemerintah memiliki harapan untuk membangun tercapainya program dan mendorong semangat evaluasi.	Evaluasi berbasis aspirasi memperkuat proses belajar organisasi dan pembangunan berkelanjutan	Sesuai
		Kegelisahan	Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dikendalikan dengan transparansi.	Keterbukaan informasi mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan	Sesuai

Sumber: Data Olahan 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan penganggaran dana desa terdapat aspek berperilaku yang berperan secara signifikan dalam mempengaruhi proses penganggaran.

1. Tahap Penetapan Tujuan

Pada tahap ini, aspek berperilaku yang dominan adalah partisipasi, keselarasan tujuan, dan komitmen. Berdasarkan temuan di lapangan (Tabel 4.3), partisipasi masyarakat terlihat jelas melalui Musyawarah Desa (MusDes) yang menjadi wadah utama penetapan program dan kegiatan. Semua peserta diberi kesempatan menyampaikan usulan, sehingga mencerminkan keterlibatan yang aktif dan merata. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi dalam penganggaran, bahwa partisipasi meningkatkan keterikatan emosional, rasa memiliki, serta akuntabilitas anggaran. Proses ini juga sesuai dengan teori kepatuhan karena dilakukan berdasarkan aturan formal, yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Keselarasan tujuan ditunjukkan dengan rencana penggunaan dana desa yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Tidak terdapat perbedaan pandangan antara aparat desa dan masyarakat karena program lahir dari kesepakatan bersama. Hal ini mendukung teori keselarasan tujuan, dimana persatuan aspirasi meminimalkan konflik dan meningkatkan efektivitas anggaran. Keselarasan ini diperkuat dengan dituangkannya hasil musyawarah ke dalam Peraturan Desa (PerDes) sebagai dasar hukum yang sah.

Selain itu, komitmen perangkat desa dan masyarakat juga tampak kuat. Aparat desa tidak hanya terlibat, tetapi konsisten menjalankan hasil MusDes, sedangkan masyarakat menunjukkan dukungan terhadap program yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori komitmen, hal ini menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran. Teori keagenan juga relevan, dimana kepala desa dan aparat bertindak sebagai agen yang menjalankan mandat masyarakat (principal), serta teori kepatuhan yang menegaskan bahwa prosedur formal pengesahan APBDes mencerminkan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi, aspek berperilaku yang dominan adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama. Pemerintah desa menyampaikan informasi kegiatan melalui berbagai media, baik formal maupun informal, yang tidak hanya bertujuan memberi informasi tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi berperilaku bahwa komunikasi efektif memperkuat pemahaman dan mencegah kesalahan implementasi. Dalam perspektif teori sinyal, keterbukaan informasi menjadi tanda akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat, sedangkan kurangnya komunikasi publik dapat menimbulkan prasangka negatif terhadap kinerja anggaran.

Koordinasi terlihat dari pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa melalui pembentukan TPK. Struktur ini memastikan pelaksanaan program berjalan terarah, terjadwal, dan melibatkan masyarakat, baik secara formal maupun dalam aktivitas sosial seperti kerja bakti. Sesuai dengan teori organisasi, pembagian tupoksi dan struktur koordinasi yang sinergis mendukung efektivitas tim dan mempercepat realisasi program. Aspek kerja sama tercermin dalam sinergi antara perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat. Kolaborasi ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil program, sekaligus memperlihatkan hubungan yang sehat antara *principal* (masyarakat) dan agen (pemerintah desa) sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Dengan demikian, implementasi anggaran tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan gerakan kolektif membangun desa.

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

Pada tahap pengendalian dan evaluasi, aspek berperilaku yang menonjol adalah tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Tekanan dirasakan oleh hukum tua sebagai penanggung jawab utama dana desa, namun hal ini dapat diminimalkan melalui sistem kerja yang solid, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi dengan TPK dan lembaga desa. Sesuai teori berperilaku, tekanan kerja tidak selalu berdampak negatif jika dikelola dengan dukungan organisasi yang kuat.

Motivasi muncul dari dorongan aparat desa untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan desa. Rasa bangga, kebersamaan, serta komitmen moral mendorong evaluasi dilakukan lebih serius, bukan sekadar formalitas. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan bahwa agen termotivasi bukan hanya karena kontrak formal, tetapi juga karena tanggung jawab moral kepada *principal* (masyarakat).

Aspirasi masyarakat dan perangkat desa tercermin dalam harapan peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan program sosial. Evaluasi berbasis aspirasi memungkinkan organisasi desa belajar dari pengalaman serta menyesuaikan strategi di masa depan, sehingga penganggaran lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Sementara itu, kegelisahan muncul akibat ketidakpastian, baik dari masyarakat terkait transparansi maupun dari perangkat desa terkait perubahan kebijakan pusat. Kekhawatiran tersebut diatasi melalui sosialisasi terbuka, publikasi realisasi anggaran, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori sinyal bahwa keterbukaan informasi menurunkan ketidakpastian dan membangun kepercayaan, serta teori kepatuhan yang menegaskan perilaku patuh dipengaruhi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan hanya regulasi formal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “ Analisis aspek berperilaku dalam proses penganggaran dana desa di desa Pinabetengan Utara, Kec. Tompaso Barat. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Tujuan

Partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa sangat terlihat. Keterlibatan warga menciptakan keselarasan antara tujuan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perangkat desa juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam merancang anggaran yang sesuai.

2. Tahap Implementasi

Pelaksanaan anggaran berjalan efektif karena adanya komunikasi terbuka, koordinasi antar pelaksana yang jelas, serta kerja sama yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi ini membuat kegiatan lebih lancar dan program lebih tepat sasaran.

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

Meski terdapat tantangan seperti tekanan kerja dan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan, hal tersebut dapat diatasi melalui penguatan sistem pengawasan serta peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, perilaku individu dan hubungan sosial antar aktor penganggaran terbukti mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa secara signifikan. Penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi, khususnya pada akuntansi berperilaku dan akuntansi manajemen. Proses penganggaran desa tidak hanya menyangkut angka atau laporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia, seperti partisipasi, komunikasi, komitmen, dan motivasi. Akuntansi berperilaku membantu desa dalam menyusun anggaran yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntansi manajemen berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga memperhatikan perilaku dan dinamika sosial yang terjadi di dalam proses pengelolaan anggaran.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya difokuskan pada Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompaso Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk desa-desa lain. Selain itu, metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, sehingga analisis belum mampu mengukur secara kuantitatif sejauh mana faktor berperilaku memengaruhi efektivitas penganggaran dana desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek ke beberapa desa atau wilayah lain agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan instrumen kuesioner, untuk mengukur pengaruh partisipasi, komunikasi, dan komitmen terhadap keberhasilan penganggaran secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- A N Hasibuan, R Annam (2021) Akuntansi Manajemen: Teori dan Praktek. Merdeka kreasi grup.
- A.P. Lestari. (2021). Akuntansi keperilakuan aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran.
- Amarya Nurul Qalby, A. N. N. I. S. A. (2022). Analisis Aspek Keperilakuan Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Laba Pada CV. Bulan Bintang Kijang Kota (Doctoral dissertation, STIE Pembangunan Tanjungpinang).
- Andriadi, D. (2023). Analisis Pengaruh Akuntansi Keperilakuan Terhadap Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Kerinci (Doctoral dissertation,).
- Anggria, K. S., & Trisnarningsih, S. (2024). The Role of Behavioral Accounting Aspects in Organization Decentralization and Performance Evaluation in Companies in Indonesia. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(2), 429-438.
- Anjelina, M., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. (2024). Analisis Akuntansi Keperilakuan Dalam Proses Penganggaran (Studi Kasus Desa Watukrus Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*.
- Arfan I. Lubis (2009) Akuntansi Keprilakuan. Jakarta:Salemba Empat .
- Arwani, A., Ifadah, A., & Sa'adah, A. N. (2020). Aspek Keperilakuan Pada Pengambilan Keputusan Dan Para Pengambil Keputusan.
- Azhari, N. (2024). Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelolaan dan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018),(2021). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill Education. 70 71.
- Halim, A. (2020), (2023). Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Praktik. Jakarta: Salemba Empat.
- Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2023). *Introduction to Management Accounting* (17th ed.). Pearson.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2023). *Intermediate Accounting* (17th ed.).
- Mahardika, C., & Rokhayati, H. (2021). Analisis Aspek Keperilakuan dalam Proses Penganggaran. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 69-85.
- Mardiasmo. (2023). Akuntansi Yogyakarta: Andi Offset. Keperilakuan: Teori dan Praktik.
- Morasa, J., Pangemanan, A. V., Mantiri, J., Gani, A. H. S., Rantung, D., Tulas, I. E., & Tumimomor, C. A. (2024). Akuntansi keperilakuan. Mega press nusantara.
- Nasution, R. S. A. (2024). Teori Akuntansi Keperilakuan. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Nongkan, B. C., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Dalam Pengukuran Kinerja Pegawai (Studi Pada Pt. Astra International, Tbk-Daihatsu Sales Operation (Dso) Cabang Malalayang). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Novi Sentiya, S. S. T., Ak, M., Wulandari, D. S., Sobrotul Imtikhanah, S. E., SI, M., Syahadat, E. F., ... & ME, A. (2025). Pengantar akuntansi keperilakuan. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nurhayati, S., Sari, R. N., & Pradesa, H. A. (2022). Pengaruh Tekanan Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 72.
- Pauranan, E. V. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Keperilakuan Terrhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja (Doctoral dissertation, universitas bosowa).